PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGUATAN PERAN TKPK

Bambang Widianto
Deputi Setwapres Bidang Kesra
dan Penanggulangan Kemiskinan,
Sekretaris Eksekutif TNP2K

RAPAT KERJA TEKNIS TKPK 2012

Wilayah Tengah | 12-14 September 2012

1 TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

TARGET DAN CAPAIAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

- Tahun 2006-2012, jumlah maupun persentase penduduk miskin nasional terus menurun.
- Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mencapai target **8-10** % tahun 2014

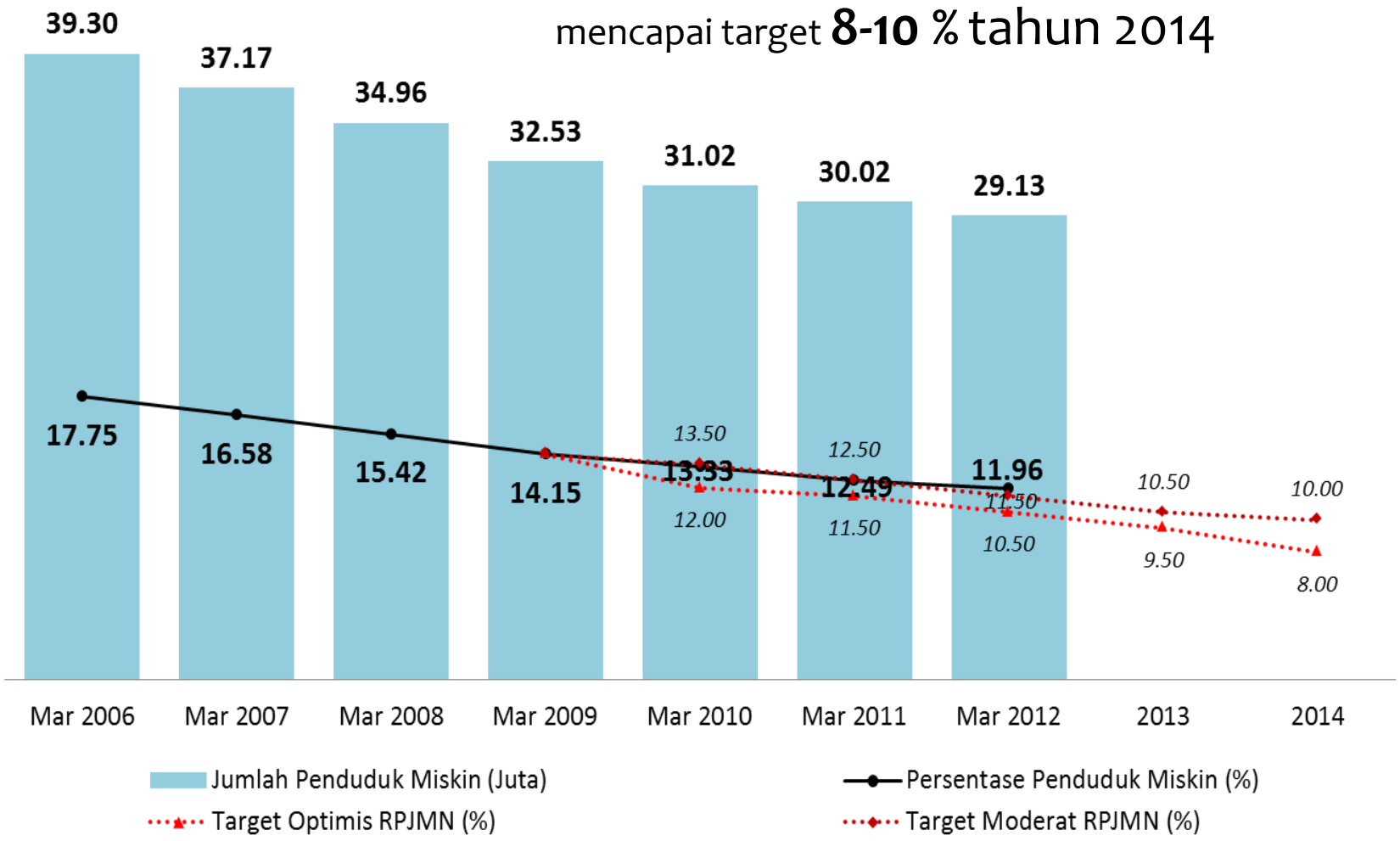

Sumber: BPS – Susenas

KESENJANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH

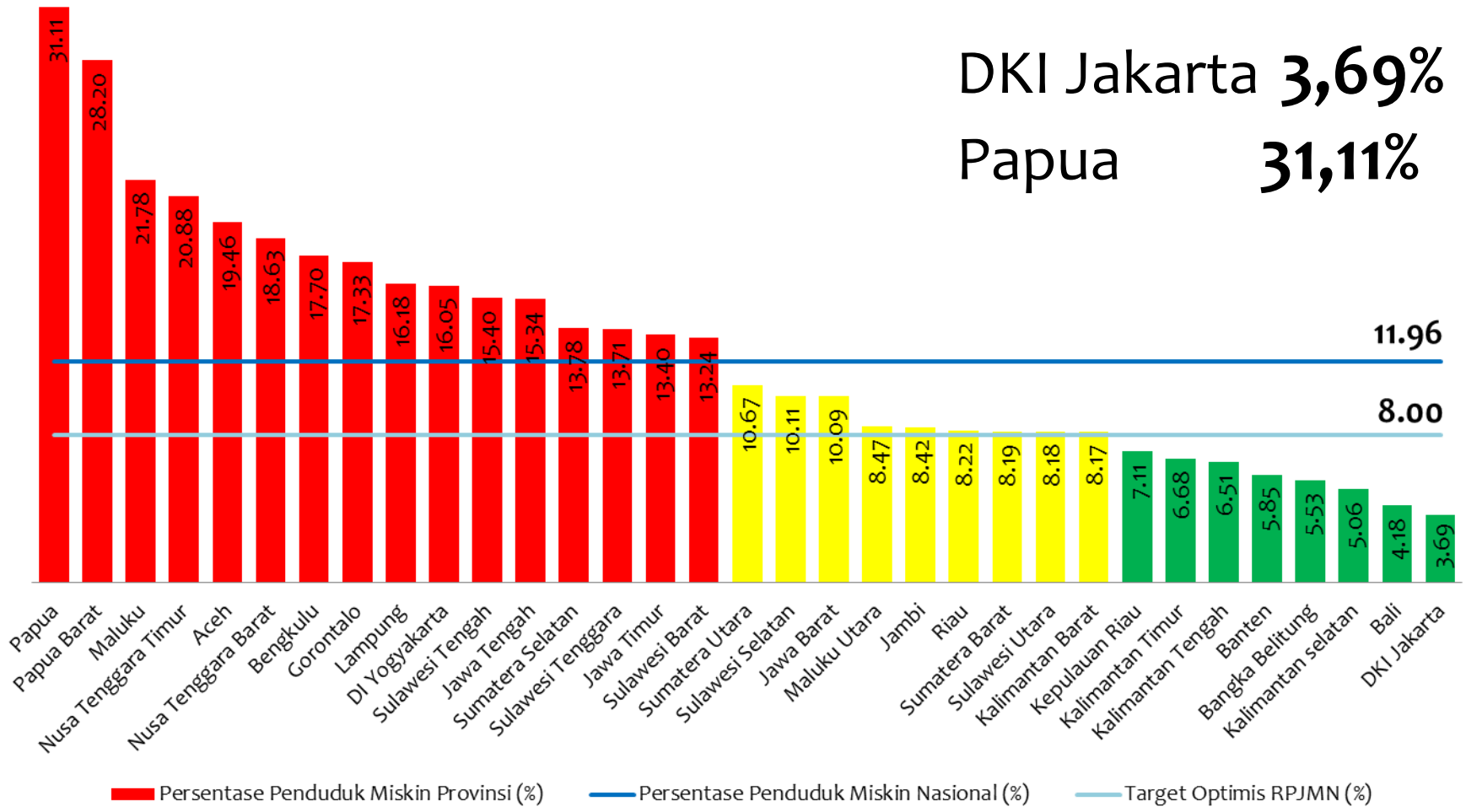

Sumber: BPS – Susenas (Maret 2012)

KETIDAKMERATAAN SEBARAN PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH

Kep. Babel **71.360** Jiwa

Jawa Timur **5.070.980** Jiwa

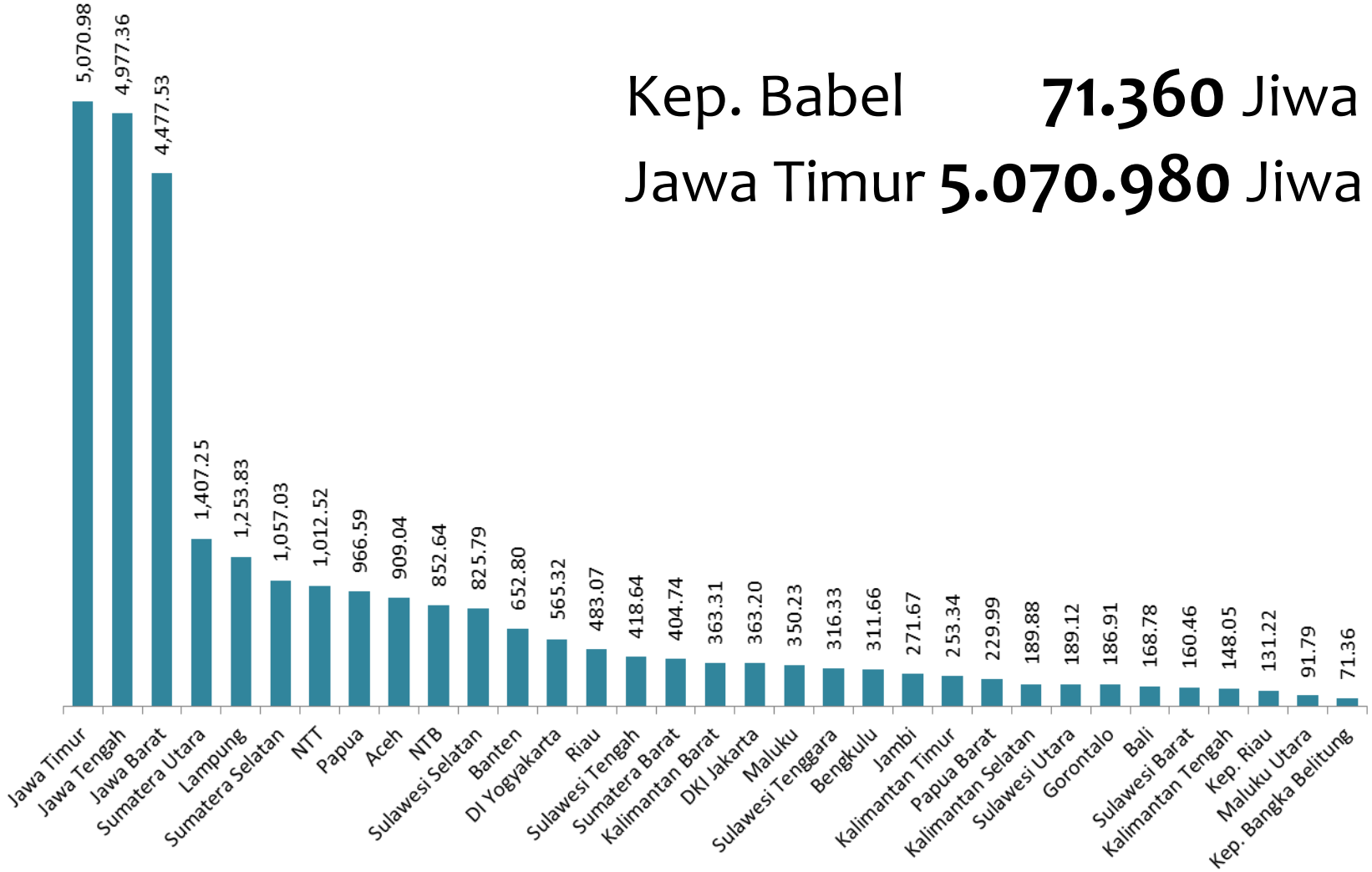

Sumber: BPS (2012)

KERENTANAN TERHADAP KEMISKINAN (1)

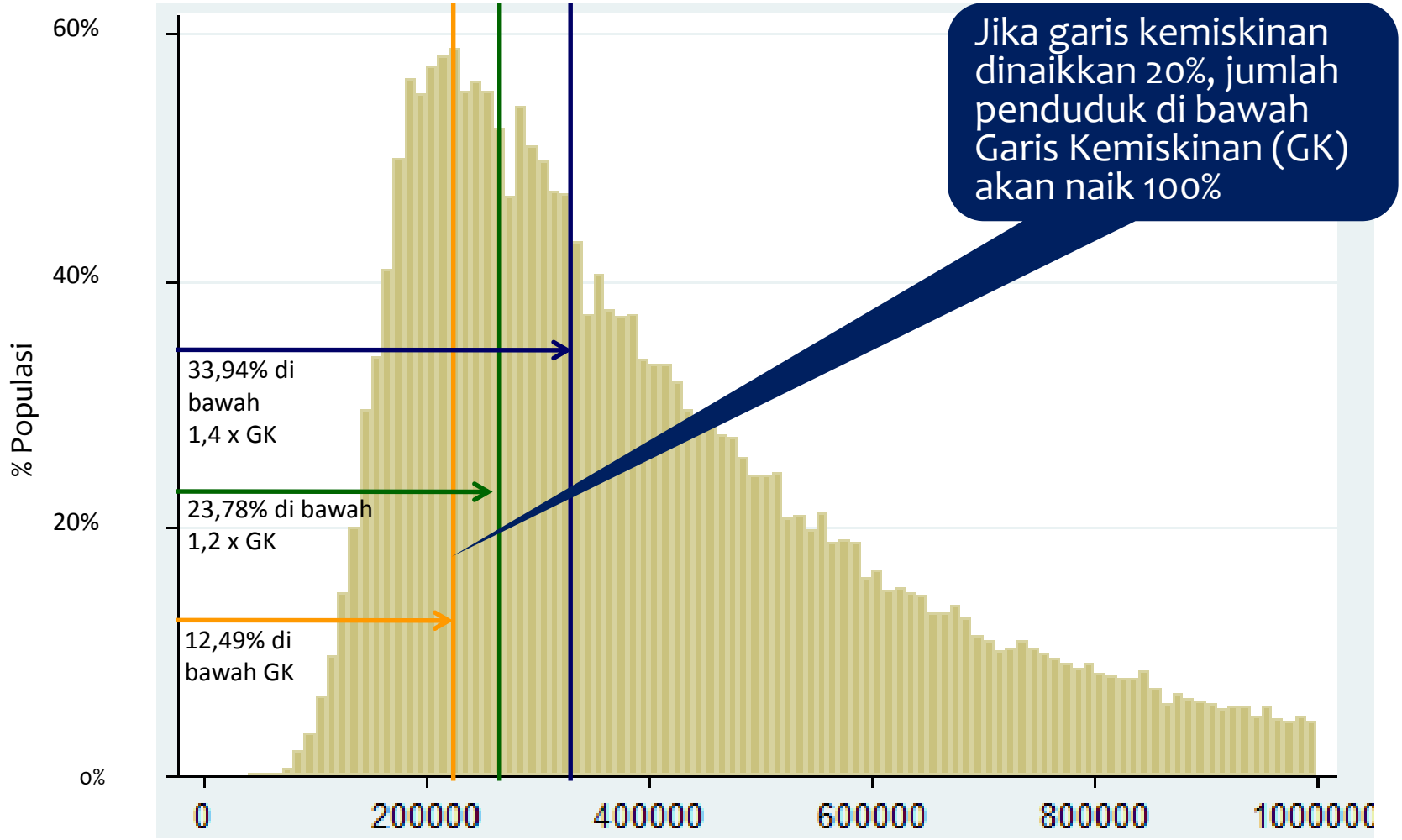

Sumber: BPS-Susenas (2010)

KERENTANAN TERHADAP KEMISKINAN (2)

		2009			Total (%)
		Miskin (%)	*Hampir Miskin (%)*	*Tidak Miskin (%)*	
2008	*Miskin (%)*	46.71	20.28	33.01	100.00
	Hampir Miskin (%)	22.32	21.53	56.15	100.00
	Tidak Miskin (%)	5.37	7.65	86.98	100.00

Sumber: BPS - Susenas

- **53%** penduduk Miskin tahun 2008 keluar dari kemiskinan (menjadi Hampir Miskin dan Tidak Miskin) pada tahun 2009.
- Sebaliknya **22,32%** penduduk Hampir Miskin tahun 2008 menjadi Miskin pada tahun 2009. Pada saat yang sama **5.37%** penduduk Tidak Miskin Miskin.

Miskin	< GK
Hampir Miskin	1 – 1,2 GK
Tidak Miskin	> 1,2 GK

EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

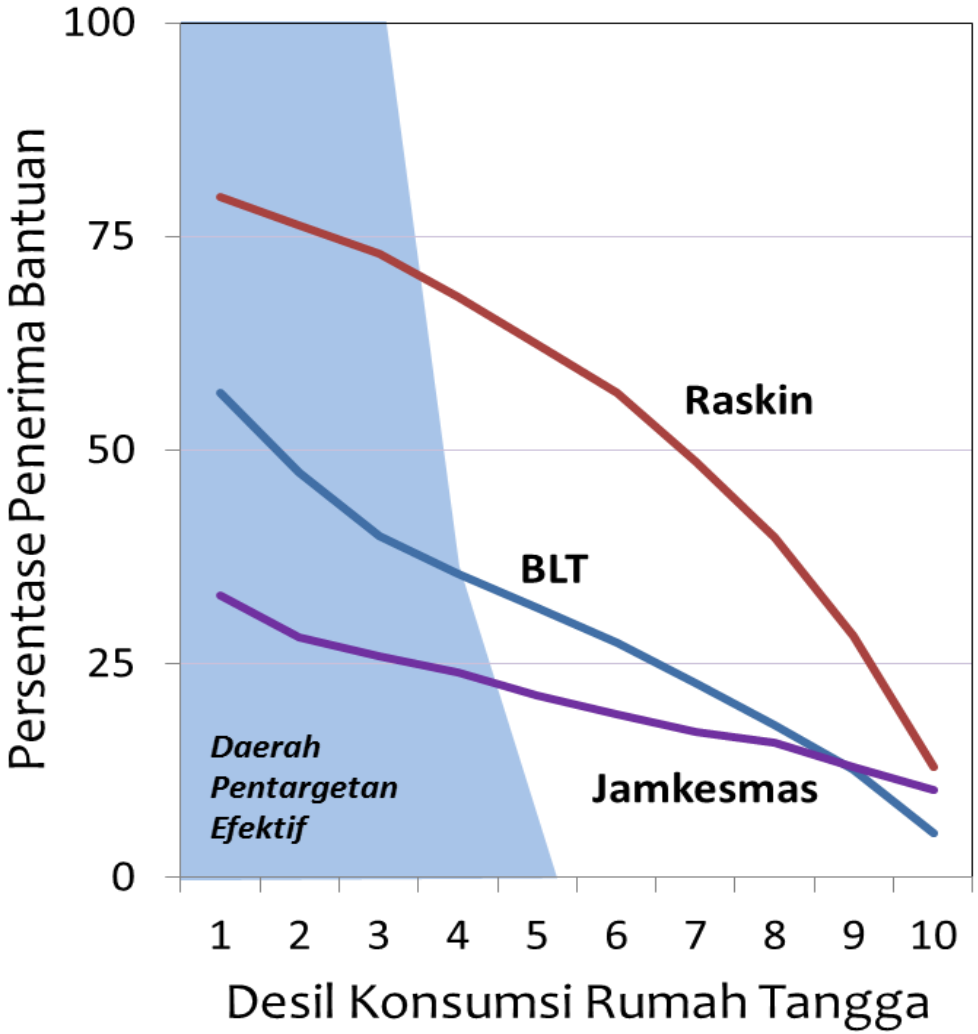

Sumber: Susenas 2009

Hanya sekitar **30%** penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1	2	3	4
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1	2	3	4
Bantuan sosial berbasis individu, rumah tangga atau keluarga	Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat	Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil	Program Pro-Rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS INDIVIDU, RUMAH TANGGA ATAU KELUARGA

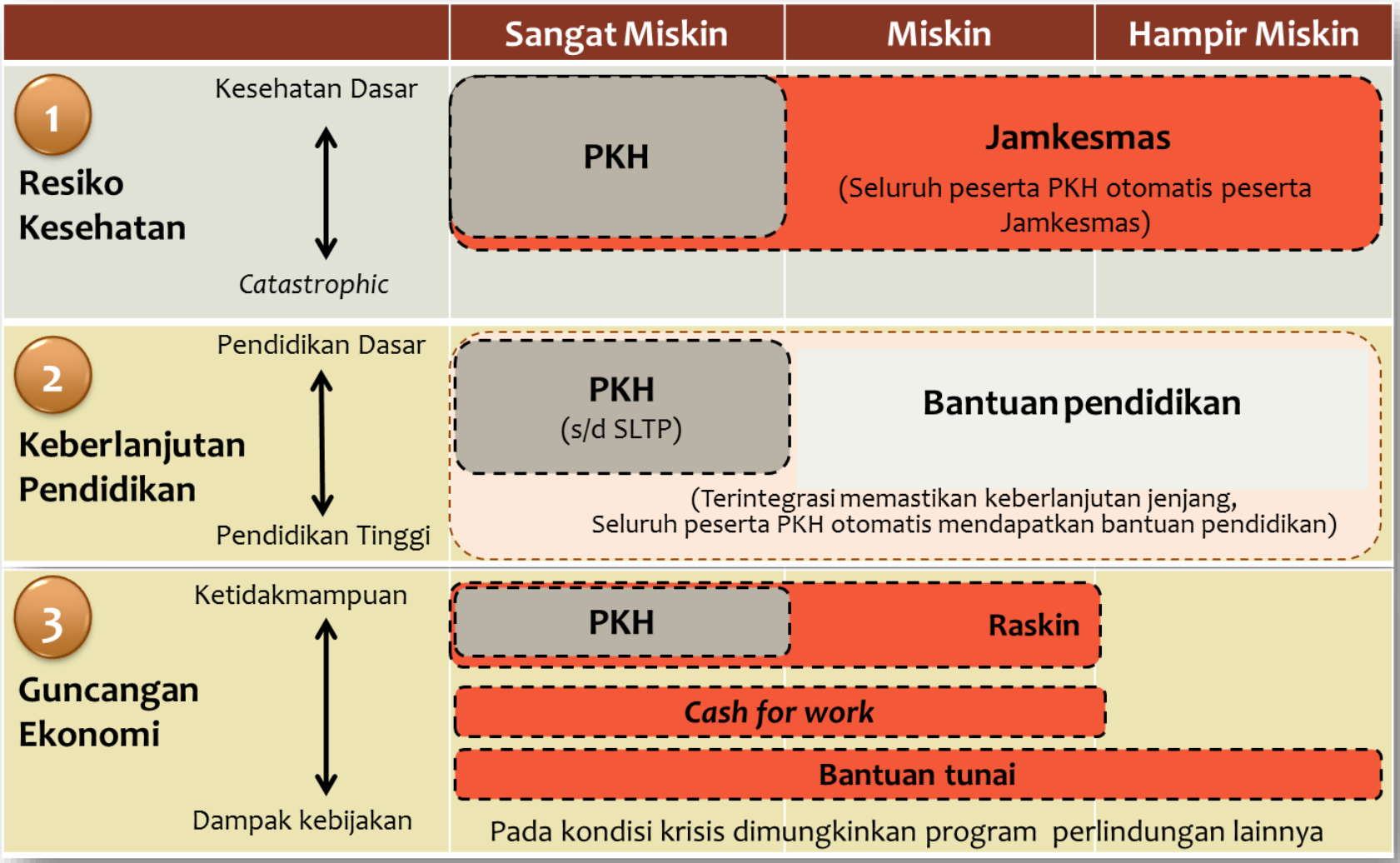

PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

PROGRAM	SASARAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok MasyarakatPerkotaan
c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
h. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
i. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
j. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
k. PNPM Neigbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan

PROGRAM BERBASIS PELAKU UMK (1)

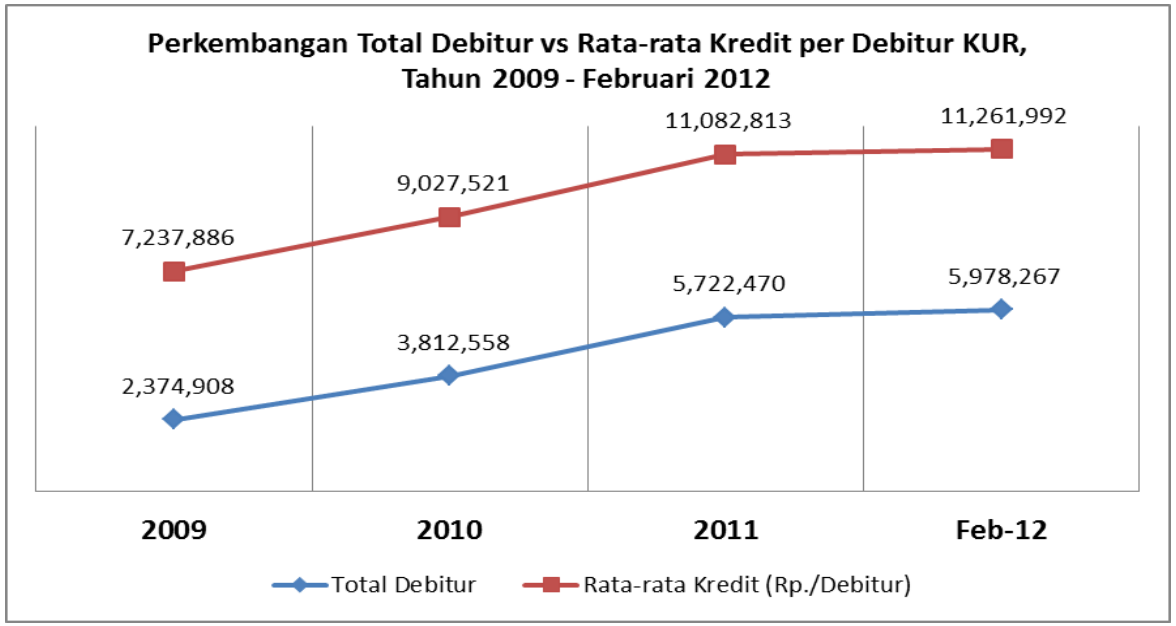

Realisasi KUR

- Selama 2009-2012 (Februari), Total Debitur maupun Rata-Rata Kredit per Debitur meningkat

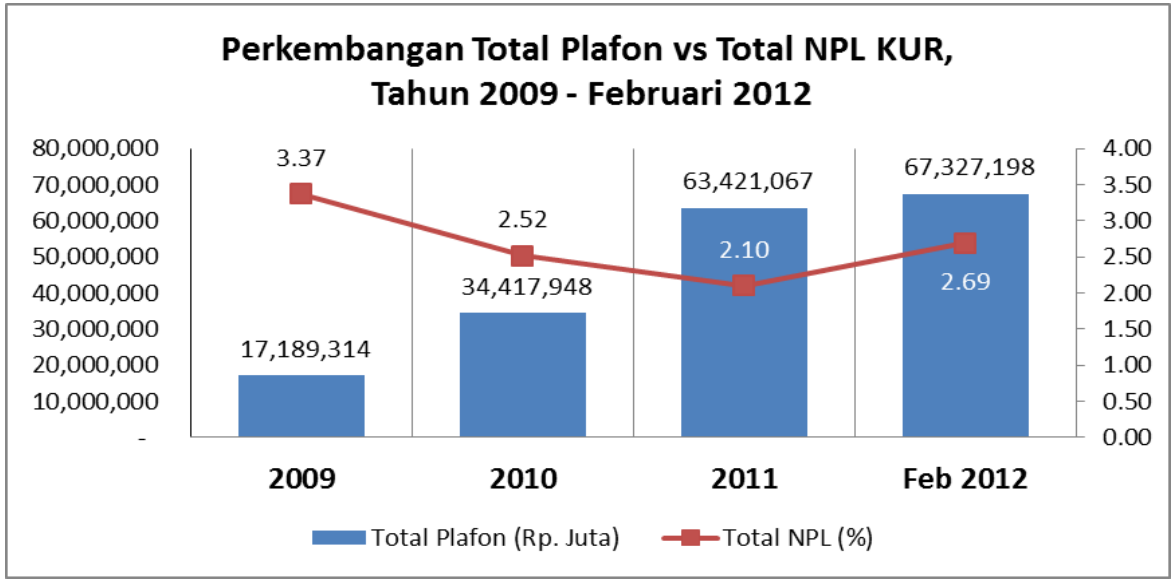

- Selama 2009-2012 (Februari), Total Plafon meningkat; dan NPL cenderung menurun

PROGRAM BERBASIS PELAKU UMK (2)

Realisasi KUR

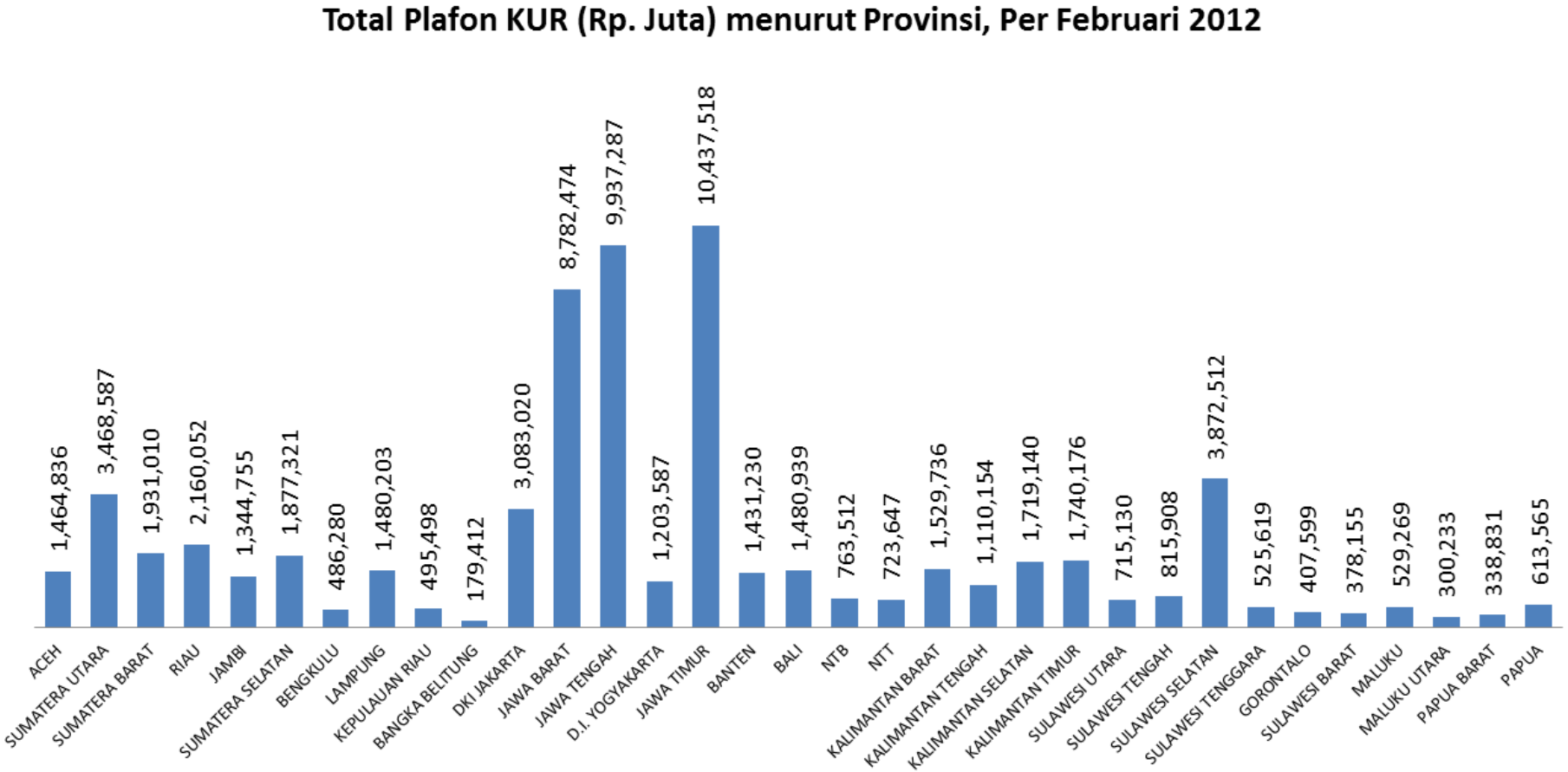

PROGRAM BERBASIS PELAKU UMK (3)

Realisasi KUR

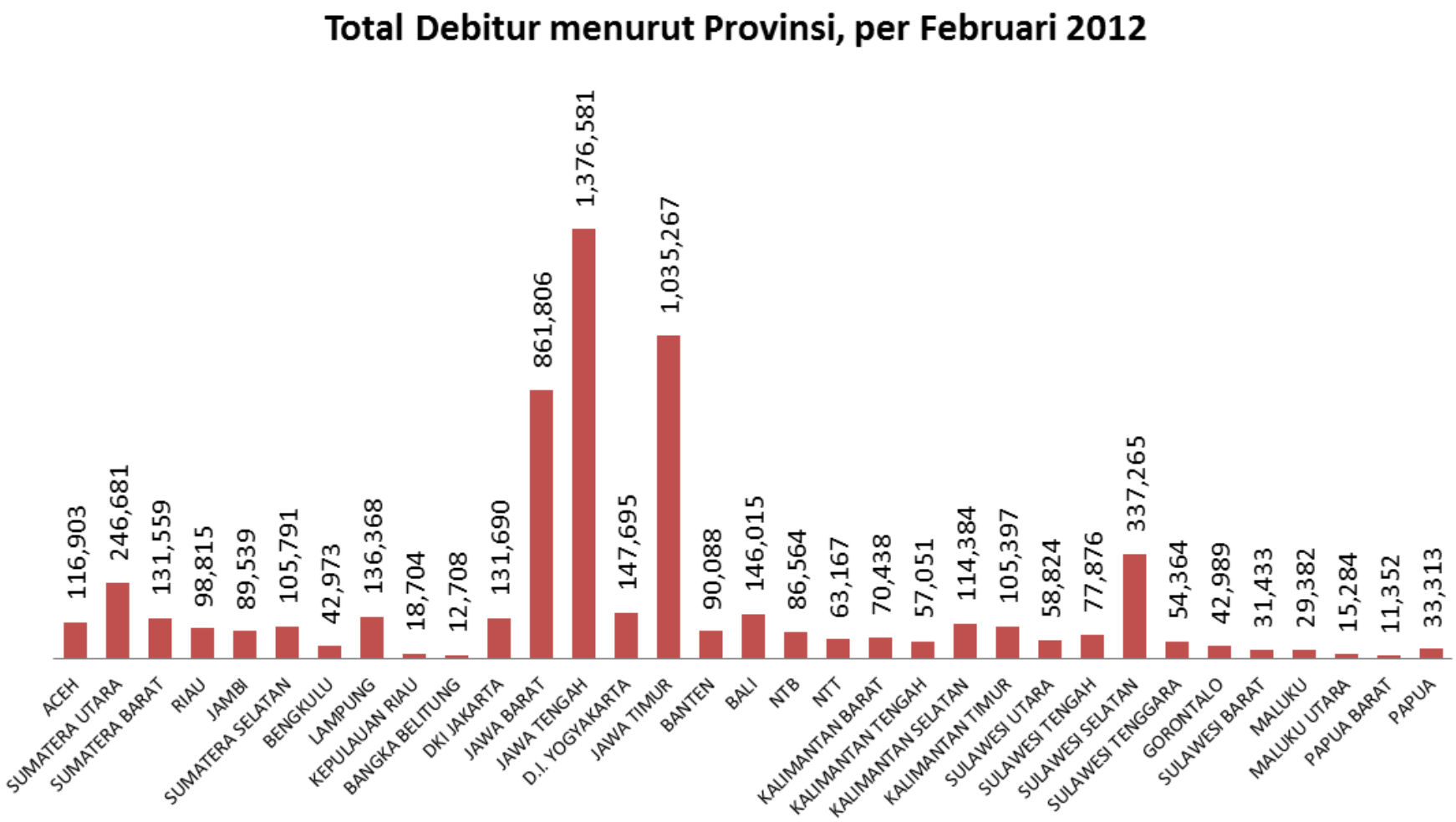

2 PERAN DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
- Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

PERAN KELEMBAGAAN TKPK

KOORDINASI

- Penyusunan SPKD
- Penyusunan Renstra SKPD
- Perancangan RKPD
- Penyusunan Renja SKPD

Program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan

PENGENDALIAN

- Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD
- Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik
- Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat

Informasi umpan-balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah

TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis)

TUGAS TIM TEKNIS TKPK:
TINDAK LANJUT PELATIHAN DAN MAGANG

MENYIAPKAN BAHAN RAPAT KOORDINASI TKPK

- HASIL ANALISIS KONDISI KEMISKINAN
- HASIL ANALISIS PRIORITAS INTERVENSI DAN PRIORITAS WILAYAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- HASIL EVALUASI ANGGARAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

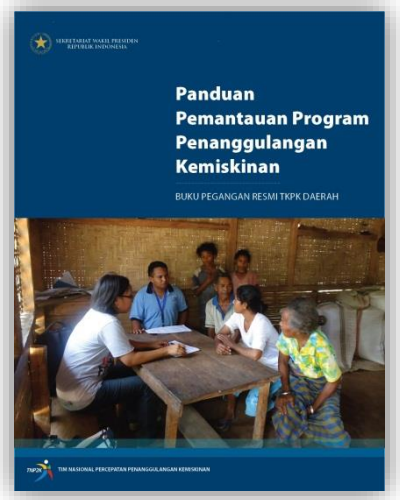

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK (1)

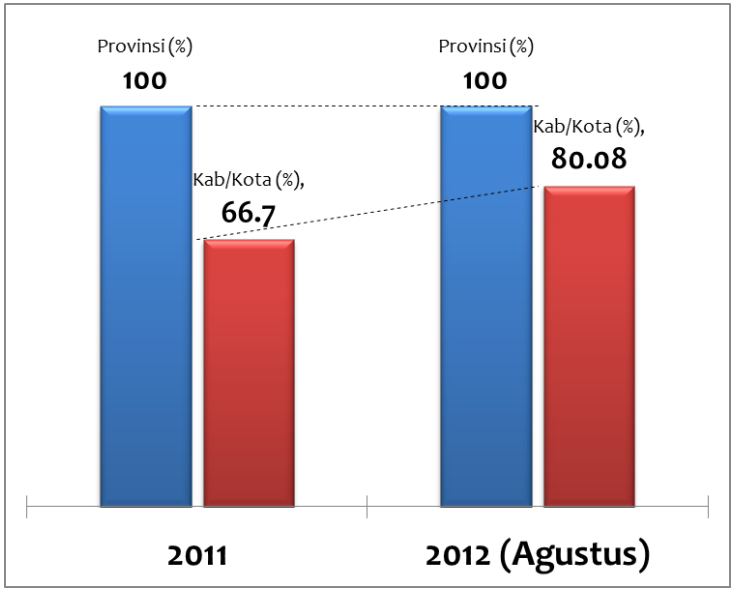

SK Pembentukan TKPK

- Sampai Agustus 2012, seluruh provinsi telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pembentukan TKPK.
- Namun demikian, masih tersisa 20% kabupaten/kota yang belum memiliki SK Bupati/Walikota untuk pembentukan lembaga ini.

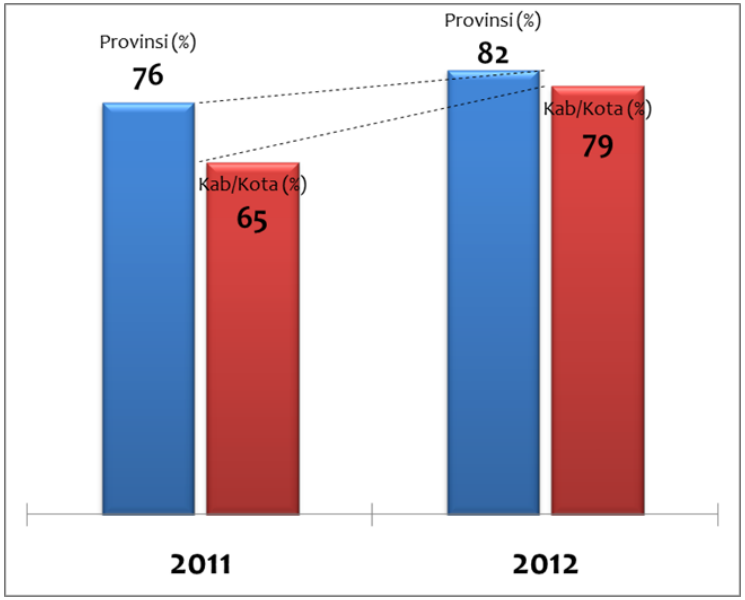

Ketersediaan Anggaran Operasional bagi TKPK

- Belum semua daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah membentuk TKPK mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung operasionalisasi fungsi lembaga ini.

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK (2)

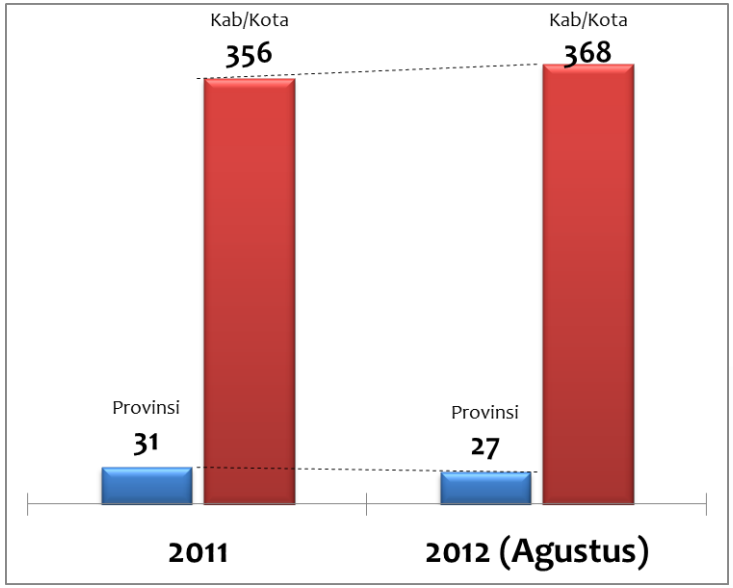

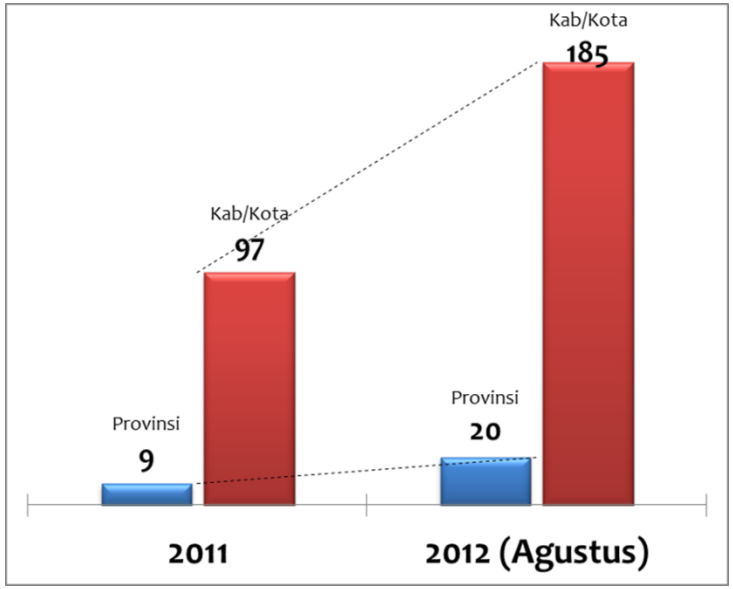

Partisipasi Tim Teknis TKPK

- Dibandingkan tahun 2011, partisipasi Tim Teknis TKPK dalam kegiatan "Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Evaluasi Anggaran Daerah" tahun 2012 mengalami peningkatan.
- Hingga Agustus 2012, sebanyak 368 TKPK Kab/Kota telah menyertakan tim teknisnya dalam pelatihan tersebut di tingkat Provinsi.

Partisipasi dalam Magang Tim Teknis TKPK

- Perkembangan positif juga terjadi dalam partisipasi TKPK dalam kegiatan magang untuk memperdalam materi pelatihan.
- Hingga Agustus 2012, sebanyak 185 TKPK Kab/Kota telah mengirimkan tim teknisnya ke sekretariat TNP2K untuk mengikuti kegiatan ini.

PELAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI LP2KD

TKPK Provinsi

TKPK Kabupaten/Kota

- Tahun 2011, sebagian besar TKPK Provinsi menyampaikan "Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan" (LP2KD)
- Tetapi mayoritas TKPK Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan ini.

PENYUSUNAN SPKD

Provinsi (2011)

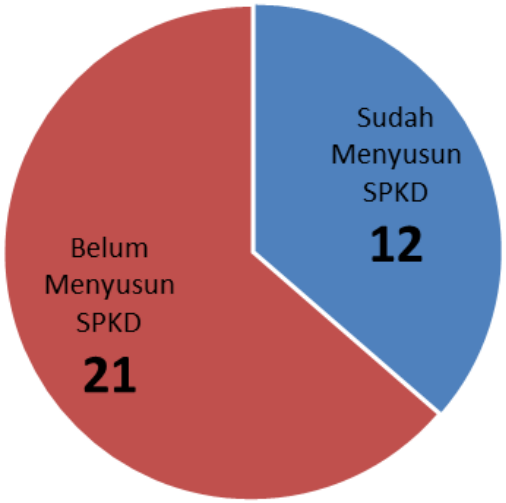

Kabupaten/Kota (2011)

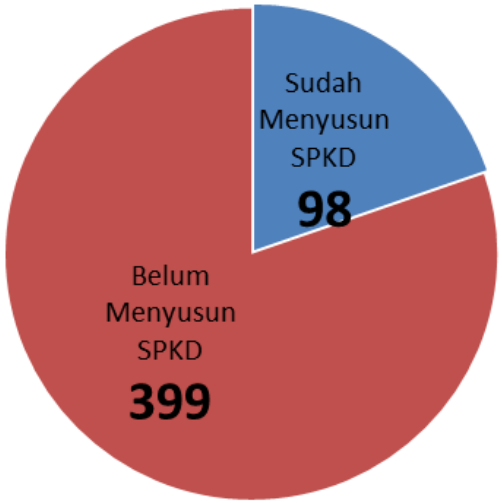

- Tahun 2011, baru sepertiga dari jumlah Provinsi yang telah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
- Mayoritas Kabupaten/Kota juga belum menyusun dokumen strategis ini.

REVIEW LP2KD

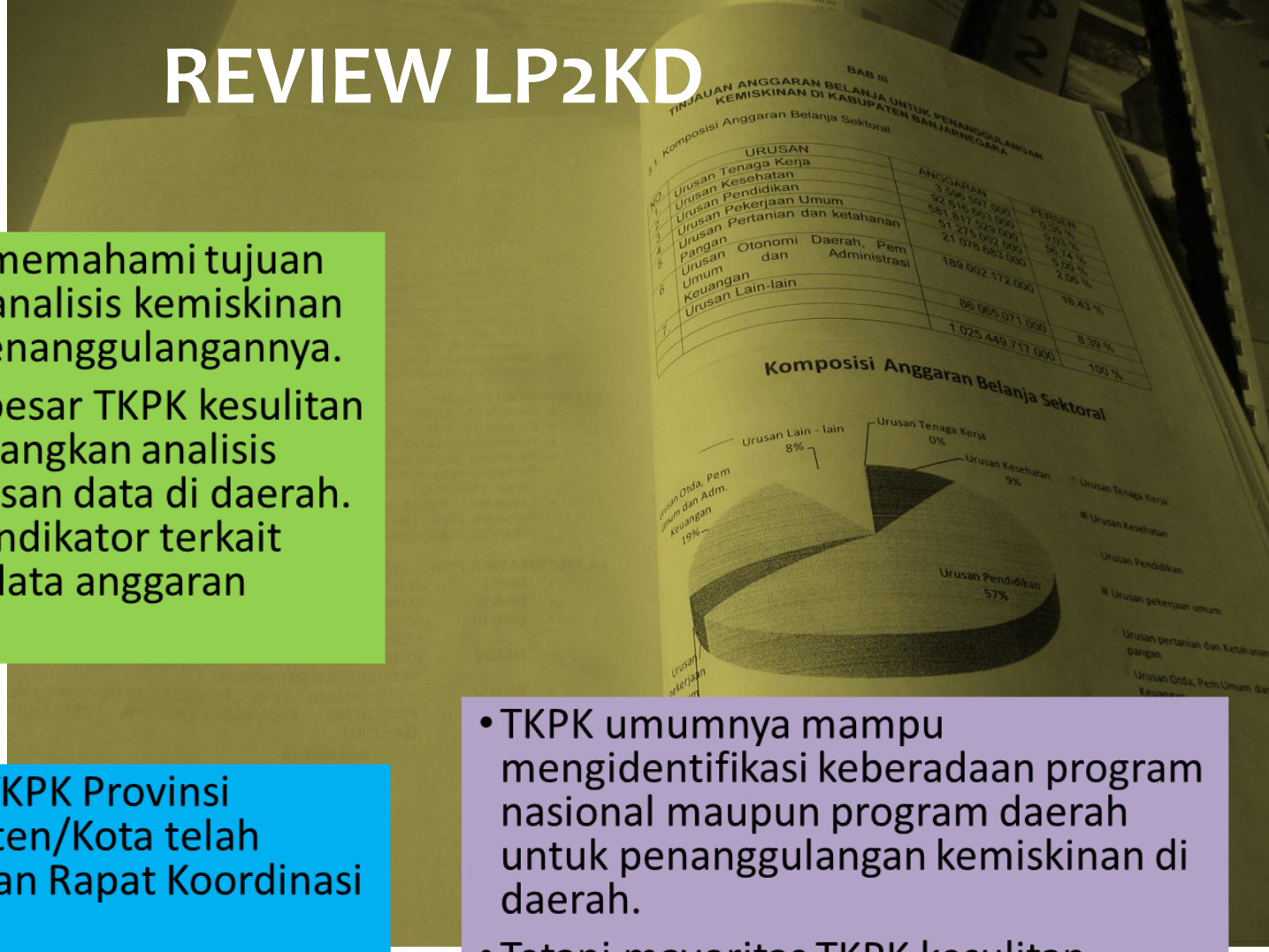

- TKPK umumnya memahami tujuan dan metodologi analisis kemiskinan dan intervensi penanggulangannya.
- Tetapi sebagian besar TKPK kesulitan dalam mengembangkan analisis karena keterbatasan data di daerah. Khususnya data indikator terkait kemiskinan dan data anggaran sektoral.

- Sebagian besar TKPK Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi TKPK.
- Tetapi agenda yang dibahas umumnya belum fokus pada upaya perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

- TKPK umumnya mampu mengidentifikasi keberadaan program nasional maupun program daerah untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
- Tetapi mayoritas TKPK kesulitan melaporkan perkembangan proses pelaksanaan dan hasil program, karena akses yang sangat terbatas terhadap informasi hasil pemantauan dan evaluasi program.

HAL YANG DIHARAPKAN DARI DAERAH

Peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK dalam perencanaan penganggaran program penanggulangan kemiskinan; serta pemantauan pelaksanaannya.

Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi untuk memantapkan basis perencanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah dan penetapan sasarannya

Peningkatan dukungan APBD untuk operasionalisasi TKPK

Penguatan kepemimpinan Kepala Daerah (penanggung jawab TKPK) dan wakil kepala daerah (ketua TKPK) untuk memobilisasi fungsi SKPD terkait dalam penanggulangan kemiskinan

Kebijakan mutasi pegawai daerah yang benar-benar mempertimbangkan kesinambungan peran Tim Teknis TKPK

Peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, terutama sektor swasta, untuk mengkonsolidasikan program dan memobilisasi dana bagi tujuan penanggulangan kemiskinan di daerah

MANFAAT PEMANTAUAN PROGRAM BAGI DAERAH

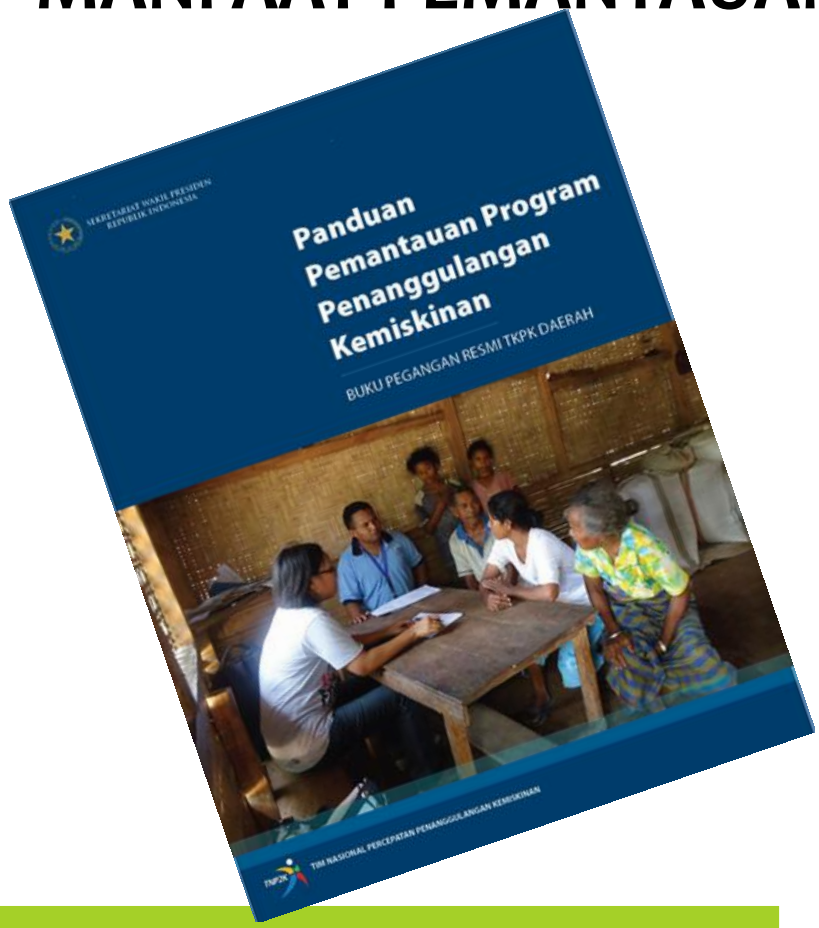

Informasi hasil pemantauan dapat menjelaskan **kebutuhan perbaikan mekanisme pengelolaan program** (prosedur, jadwal dan realisasi anggaran)penanggulangan kemiskinan di daerah

Informasi hasil pemantauan dapat menjelaskan **upaya antisipasi risiko** yang perlu dilakukan untuk menjaga tercapainya target kinerja program.

Informasi hasil pemantauan dapat menjelaskan **kontribusi yang dapat diberikan oleh daerah** dalam mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah: sinergi pusat - daerah

TERIMA KASIH